

MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS KEMENTERIAN ESDM ATAS ISU TAMBANG NIKEL DI RAJA AMPAT

THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES' CRISIS COMMUNICATION MANAGEMENT REGARDING THE NICKEL MINING ISSUE IN RAJA AMPAT

Fahmi Allaudin Ardiansyah

Magister Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya,
allaudin692@student.ub.ac.id

Diterima 6 Mei 2026

Direvisi 29 Agustus 2026

Disetujui 29 Agustus 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis manajemen krisis reputasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dalam menghadapi tekanan advokasi jaringan LSM lingkungan, khususnya Greenpeace Indonesia dan WALHI, atas isu pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang mencapai puncak pada Juni 2025. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan mengintegrasikan analisis dokumen, siaran pers resmi, laporan investigasi LSM, dan pemberitaan media nasional. Kerangka teoritis yang digunakan mencakup model Situational Crisis Communication Theory (SCCT) Coombs, model Crisis and Emergency Risk Communication, serta Outrage Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ini merupakan preventable crisis yang dipicu oleh tantangan sistemik dalam fase pra-krisis, terutama absennya sistem deteksi dini dan rencana komunikasi krisis yang terstruktur. Fragmentasi pesan antara Kementerian ESDM dan Kementerian KLH menjadi defisit kritis yang memperburuk krisis. Greenpeace Indonesia berhasil mengontrol agenda media melalui kampanye digital terkoordinasi, sementara ESDM kurang mengimplementasikan enam prinsip CERC secara konsisten. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman manajemen krisis lembaga publik di era digital, serta menawarkan rekomendasi strategis berbasis kerangka CERC untuk penguatan tata kelola komunikasi krisis kementerian.

Kata Kunci: komunikasi risiko, LSM lingkungan, manajemen krisis, Raja Ampat, tambang nikel

ABSTRACT

This study analyses the reputation crisis management of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) of the Republic of Indonesia in response to advocacy pressure from environmental NGO networks, particularly Greenpeace Indonesia and WALHI, regarding the issue of nickel mining in Raja Ampat, South-West Papua, which reached its peak in June 2025. The study employs a qualitative case study approach, integrating document analysis, official

press releases, NGO investigation reports, and national media coverage. The theoretical framework utilised encompasses Coombs' Situational Crisis Communication Theory (SCCT), the Crisis and Emergency Risk Communication model, and Outrage Analysis. The research findings indicate that this crisis was a preventable crisis triggered by systemic failures in the pre-crisis phase, particularly the absence of an early warning system and a structured crisis communication plan. The fragmentation of messaging between the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) and the Ministry of Environment and Forestry (KLH) constituted a critical shortcoming that exacerbated the crisis. Greenpeace Indonesia successfully controlled the media agenda through a coordinated digital campaign, whilst the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) failed to consistently implement the six principles of CERC. This study contributes to the understanding of crisis management in public institutions in the digital age and offers strategic recommendations based on the CERC framework to strengthen the ministries' crisis communication governance.

Keywords: *crisis management, environmental NGOs, nickel mining, Raja Ampat, risk communication*

PENDAHULUAN

Pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, memunculkan salah satu krisis reputasi paling kompleks yang dihadapi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dalam dekade terakhir. Kawasan Raja Ampat, yang diakui sebagai salah satu ekosistem laut terkaya di planet ini dan bagian dari Geopark Global UNESCO, menjadi arena benturan antara kepentingan hilirisasi mineral strategis nasional dan tuntutan pelestarian lingkungan hidup yang didukung jaringan advokasi transnasional.

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, mencapai 42% dari total cadangan global. Sejak diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel mentah pada 2019, nilai ekspor produk turunan nikel melonjak drastis dari US\$3,3 miliar menjadi US\$34 miliar pada periode 2023–2024 (ESDM, 2024). Kebijakan hilirisasi ini diperkuat melalui Keputusan Nomor 69.K/MB.01/MEM.B/2024 yang mengklasifikasikan nikel sebagai mineral strategis nasional. Namun dibalik capaian ekonomi tersebut, tersimpan konflik yang belum terselesaikan antara kepentingan ekstraktif dan perlindungan ekosistem pulau-pulau kecil.

Ketegangan tersebut meledak secara publik pada 3 Juni 2025, ketika aktivis Greenpeace Indonesia bersama pemuda Papua menggelar aksi damai di Indonesia Critical Minerals Conference & Expo 2025 di Jakarta. Aksi yang viral di media sosial ini memicu serangkaian peristiwa yang membawa Kementerian ESDM ke titik krisis reputasi yang signifikan: dari janji evaluasi izin oleh Menteri Bahlil Lahadalia, kunjungan lapangan ke Pulau Gag, hingga pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 10 Juni 2025. Meski demikian, LSM lingkungan menilai respons pemerintah bersifat setengah hati, mengingat PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk tetap diizinkan beroperasi.

Fenomena ini menarik dikaji dari perspektif manajemen krisis dan komunikasi risiko karena beberapa alasan akademis. Pertama, krisis ini melibatkan institusi negara (bukan korporasi), sehingga memberi nuansa yang berbeda dalam analisis krisis publik. Kedua, kasus ini merepresentasikan konflik klasik antara agenda pembangunan ekonomi dan kepentingan pelestarian lingkungan dengan dimensi stakeholder yang sangat kompleks. Ketiga, keterlibatan jaringan advokasi transnasional Greenpeace global dan WALHI menjadikan kasus ini relevan untuk studi komunikasi krisis multipihak di era digital.

Penelitian terdahulu tentang krisis reputasi lembaga publik di sektor pertambangan telah banyak dilakukan, namun mayoritas berfokus pada korporasi (Suhartini et al., 2024). Kajian tentang bagaimana kementerian pemerintah mengelola krisis reputasi akibat tekanan jaringan advokasi lingkungan yang terorganisir secara digital masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis

secara komprehensif bagaimana Kementerian ESDM mengelola krisis reputasinya, mengidentifikasi defisit dan kendala komunikasi yang terjadi, serta merumuskan rekomendasi strategis berbasis kerangka teoritis yang relevan.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana profil dan karakteristik krisis reputasi yang dihadapi Kementerian ESDM dalam kasus tambang nikel di Raja Ampat? (2) Bagaimana manajemen krisis dan komunikasi risiko yang dilakukan Kementerian ESDM dalam merespons tekanan advokasi LSM lingkungan? (3) Apa defisit utama dalam implementasi model CERC dan implikasi strategis?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif (*qualitative case study*) yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kontemporer dalam konteks nyata (Yin, 2018). Desain studi kasus instrumental dipilih karena kasus tambang nikel di Raja Ampat berfungsi sebagai jendela untuk memahami fenomena yang lebih luas, yakni dinamika manajemen krisis lembaga publik di era digital dalam menghadapi tekanan advokasi lingkungan transnasional.

Sumber data penelitian terdiri dari dua kategori. Data primer mencakup siaran pers resmi Kementerian ESDM periode 3–10 Juni 2025 yang diperoleh dari esdm.go.id, laporan investigasi Greenpeace Indonesia berjudul 'Surga yang Hilang?' (12 Juni 2025), pernyataan resmi WALHI yang dipublikasikan melalui Tempo.co dan Media Indonesia (11–12 Juni 2025), dan Laporan Khusus Raja Ampat oleh LPEM FEB UI (Juli 2025). Data sekunder mencakup pemberitaan media nasional terpilih (*Tempo*, *Kompas*, *Detik*, *Mongabay Indonesia*) dan publikasi ilmiah yang relevan dengan manajemen krisis dan komunikasi risiko.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sistematis. Dokumen-dokumen kunci dikumpulkan, diklasifikasikan berdasarkan sumber dan kronologi, serta validasi silang (*triangulasi sumber*) untuk memastikan akurasi. Analisis data menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis naratif kronologis.

Kerangka analisis yang digunakan mencakup tiga teori utama. Pertama, *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) dari Coombs (2014) untuk mengidentifikasi tipe krisis dan mengevaluasi strategi respons krisis. Kedua, model *Crisis and Emergency Risk Communication* (CERC) dari Reynolds dan Seeger (2005) untuk menganalisis efektivitas komunikasi krisis pada setiap fase. Ketiga, *Outrage Analysis* dari Sandman (1993) untuk memahami dinamika persepsi risiko publik. Selain itu, digunakan pula *Salience Model* dari Mitchell, Agle dan Wood (1997) untuk pemetaan *stakeholder*.

Validitas penelitian ditingkatkan melalui triangulasi sumber data (dokumen pemerintah, laporan LSM, pemberitaan media) dan triangulasi teori (SCCT, CERC, *Outrage Analysis*). Batasan penelitian mencakup keterbatasan akses terhadap dokumen internal Kementerian ESDM dan tidak dilakukannya wawancara primer dengan informan kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Karakteristik Krisis Reputasi Kementerian ESDM

Berdasarkan tipologi Coombs (2014) dalam SCCT, krisis yang dihadapi Kementerian ESDM tergolong sebagai *Preventable Crisis* khususnya *subtipe* *Organizational Misdeeds* karena pelanggaran regulasi yang terjadi seharusnya dapat dicegah oleh pengawasan institusional yang lebih ketat. Aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil yang dilindungi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 berlangsung tanpa deteksi dan penindakan sejak dini. Lebih dari 500 hektare hutan alami di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran telah hilang sebelum isu ini mencuat secara publik (Greenpeace Indonesia, 2025).

Dalam perspektif Fearn-Banks (2016), krisis ini juga dapat dikategorikan sebagai Environmental Crisis yang dipicu oleh kelalaian institusional, dengan dimensi stakeholder crisis yang kuat. Konflik kepentingan melibatkan empat kelompok utama: pemerintah selaku pemberi izin, industri pertambangan sebagai penerima manfaat ekonomi, masyarakat lokal sebagai korban dampak ekologis, dan jaringan advokasi lingkungan sebagai *pressure group*.

Analisis stakeholder menggunakan Salience Model Mitchell, Agle dan Wood (1997) menunjukkan bahwa Greenpeace Indonesia, meski tidak memiliki kekuasaan formal, memperoleh atribut definitif stakeholder berkat kombinasi legitimasi tinggi dan urgensi yang sangat tinggi. Hal ini menjelaskan mengapa tekanan advokasi mereka sangat efektif meski berhadapan dengan institusi negara berkapasitas besar. Komunitas lokal Raja Ampat teridentifikasi sebagai dependent stakeholders legitimasi tinggi, urgensi sangat tinggi, namun kekuatan rendah yang membutuhkan representasi dari pihak ketiga (Greenpeace, WALHI) untuk mengangkat kepentingannya ke panggung publik.

Cakupan krisis bersifat multi-level: dari tingkat lokal (komunitas nelayan di Raja Ampat), nasional (opini publik Indonesia, DPR, DPD, akademisi), hingga internasional (Greenpeace global, komunitas UNESCO, pasar nikel dunia). Penyebaran krisis dipercepat secara masif oleh media sosial melalui tagar #SaveRajaAmpat yang memperoleh jutaan impresi. Laporan investigasi Greenpeace 'Surga yang Hilang?' (2025) mengungkap 16 IUP nikel di Raja Ampat, 12 di antaranya berlokasi dalam kawasan UNESCO Geopark, serta mendokumentasikan dukungan lebih dari 60.000 penandatangan petisi.

Manajemen Krisis: Analisis Tiga Fase Coombs

Mengacu pada model proses manajemen krisis Coombs (2014), analisis terhadap respons Kementerian ESDM dibagi dalam tiga fase: pra-krisis, respons krisis, dan pasca-krisis. Fase pra-krisis mencerminkan tantangan sistemik dalam manajemen risiko preventif. Kementerian ESDM tidak memiliki mekanisme deteksi dini yang efektif atas aktivitas tambang di pulau-pulau kecil yang dilindungi undang-undang. Sinyal peringatan dari laporan lingkungan Greenpeace tahun 2024 tidak ditindaklanjuti secara serius. Tidak ada komunikasi proaktif dengan komunitas lokal maupun LSM lingkungan. Kondisi ini mencerminkan ketiadaan crisis preparedness plan yang memadai, bertentangan dengan rekomendasi best practice crisis management (Fearn-Banks, 2016). Fase ini merupakan representasi paling jelas dari kendala preventif yang seharusnya menjadi garis pertahanan pertama dalam manajemen krisis lembaga publik.

Fase Respons Krisis (3–30 Juni 2025) menunjukkan pola komunikasi reaktif dengan beberapa strategi yang dapat diidentifikasi. Pertama, strategi akomodasi (accomodation) terlihat dari janji Menteri Bahlil untuk mengevaluasi izin tambang segera setelah aksi Greenpeace, dan pencabutan empat IUP pada 10 Juni 2025. Kedua, strategi justifikasi (justification) tampak dari kunjungan lapangan ke PT Gag Nikel (7 Juni 2025) dan pernyataan 'tidak ada masalah berarti' yang bertujuan melegitimasi keputusan mempertahankan izin PT Gag Nikel. Ketiga, counter-narrative melalui stakeholder lokal dilakukan dengan merilis testimoni nelayan yang menyatakan dampak positif kehadiran perusahaan tambang.

Defisit paling krusial pada fase ini adalah fragmentasi komunikasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian KLH. Pada 8 Juni 2025, Menteri KLH Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan temuan yang bertolak belakang dengan posisi ESDM: 'Hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup.' Inkonsistensi pesan antar-kementerian ini tidak hanya melemahkan kredibilitas pemerintah, tetapi juga memperkuat narasi LSM tentang lemahnya tata kelola lingkungan nasional. Greenpeace berhasil merebut dan mempertahankan kendali atas agenda media sejak awal krisis.

Fase pasca-krisis ditandai dengan respons yang inkonsisten. PT Gag Nikel yang sempat dibekukan ementa diizinkan beroperasi beberapa bulan kemudian setelah kajian lintas ementerian. Keputusan ini mencederai kepercayaan ement dan memvalidasi kekhawatiran

Greenpeace bahwa pencabutan IUP hanya bersifat taktis. Tidak ada ementer ementeria signifikan terkait reformasi tata ement perizinan, kompensasi ementeria terdampak, maupun mekanisme dialog formal yang dipublikasikan secara resmi. Alih-alih memulihkan reputasi, respons pasca-krisis justru memperbarui gelombang kritik dan mengkonfirmasi krisis ke dalam fase kronis (*chronic phase*).

Tabel 1. Kronologi Manajemen Krisis Kementerian ESDM, Juni 2025

Tanggal	Tindakan ESDM
3 Juni 2025	Menteri Bahlil berjanji evaluasi IUP. Respons verbal, tidak terstruktur.
7 Juni 2025	Kunjungan lapangan ke PT Gag Nikel. Dirjen: 'tidak ada masalah'.
8 Juni 2025	Tidak ada pernyataan baru. Konflik dengan KLH terekspos 20ement.
10 Juni 2025	Pencabutan empat IUP (ASP, MRP, KSM, Nurham). PT Gag Nikel dipertahankan.
12 Juni 2025	Evaluasi lintas 20ementarian berjalan. Tidak ada siaran pers baru.
Sept 2025	PT Gag Nikel diizinkan 20emente beroperasi setelah kajian lintas 20ementarian.

Sumber: Siaran pers ESDM, laporan Greenpeace Indonesia, pemberitaan Tempo.co dan Kompas (2025)

Analisis Komunikasi Risiko: Model CERC dan Outrage Analysis

Evaluasi menggunakan model CERC (Reynolds & Seeger, 2005) mengidentifikasi gap signifikan pada hampir seluruh fase implementasinya oleh Kementerian ESDM. Pada fase pre-crisis, tidak ada crisis preparedness plan yang terstruktur. Sinyal awal dari investigasi Greenpeace tahun 2024 diabaikan, dan tidak ada saluran komunikasi proaktif yang dibangun dengan LSM maupun komunitas lokal. Ini bertentangan dengan prinsip dasar CERC yang menekankan kesiapsiagaan komunikasi sebagai fondasi manajemen krisis yang efektif.

Pada fase Initial Event, respons ESDM terlambat, kurang terstruktur, dan tidak empati terhadap masyarakat terdampak. Greenpeace mendominasi framing awal melalui aksi damai yang dirancang secara strategis untuk memaksimalkan eksposur media pada momentum Indonesia Critical Minerals Conference. Pada fase Maintenance, inkonsistensi pesan antara ESDM dan KLH merusak kredibilitas seluruh respons pemerintah. Fase Resolution menunjukkan resolusi yang tidak tuntas pencabutan empat IUP tanpa komunikasi yang memadai tentang tindak lanjut sehingga memicu krisis lanjutan. Fase Evaluation tidak terlaksana secara terbuka; tidak ada laporan evaluasi publik yang tersedia.

Ditinjau dari perspektif Outrage Analysis Sandman (1993) yang merumuskan bahwa Risiko Komunikasi=Bahaya (Hazard)+Kemarahan (Outrage), tingkat outrage publik pada kasus ini sangat tinggi karena empat faktor utama. Pertama, involuntariness: masyarakat lokal tidak memilih untuk menanggung dampak tambang. Kedua, unfairness: manfaat ekonomi dinikmati pihak lain sementara risiko ditanggung warga setempat. Ketiga, lack of trust: inkonsistensi pernyataan ESDM dan KLH secara publik. Keempat, moral outrage: status Raja Ampat sebagai 'surga terakhir' memperkuat resonansi emosional kampanye dan menciptakan solidaritas moral lintas batas geografis.

Analisis SWOT menunjukkan bahwa Kementerian ESDM memiliki kekuatan institusional berupa otoritas hukum sebagai regulator dan akses data teknis pertambangan. Namun, kelemahan internal yang bersifat struktural fragmentasi komunikasi antar kementerian, bias pro-industri yang terpublikasi, dan lemahnya sistem pemantauan ekologis menjadi faktor dominan yang menentukan kualitas respons krisis. Di sisi eksternal, momentum reformasi tata kelola mineral dan tuntutan pasar global atas nikel bersertifikat ESG merupakan peluang yang

belum dioptimalkan. Ancaman terkritik meliputi eskalasi kampanye advokasi internasional, potensi sanksi UNESCO, dan erosi kepercayaan investor ESG.

Implikasi Teoritis dan Rekomendasi Strategis

Temuan penelitian ini memberikan beberapa kontribusi teoritis. Pertama, penelitian ini memperkuat argumen bahwa dalam era digital, aktor non-negara seperti Greenpeace dapat melampaui kapasitas komunikasi institusi pemerintah apabila pemerintah tidak responsif dan transparan. Kemampuan Greenpeace Indonesia mengintegrasikan investigasi lapangan, produksi konten visual, aksi simbolis yang terkalkulasi secara strategis, dan distribusi digital masif merepresentasikan model advokasi baru yang melampaui batas-batas konvensional kampanye lingkungan.

Kedua, penelitian ini mengilustrasikan bagaimana fragmentasi pesan antar lembaga pemerintah dapat menjadi amplifikator krisis yang lebih berbahaya daripada konten pesan yang disampaikan. Inkonsistensi publik antara ESDM dan KLH tidak hanya melemahkan otoritas kedua kementerian, tetapi juga menciptakan ruang naratif yang segera diisi oleh framing LSM. Hal ini konsisten dengan temuan Seeger, Sellnow dan Ulmer (2003) tentang pentingnya koordinasi pesan dalam komunikasi krisis organisasional.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan tiga klaster intervensi strategis. Pertama, pada fase pra-krisis: pembentukan Crisis Communication Unit permanen di bawah Biro Komunikasi ESDM, pembangunan sistem early warning berbasis pemantauan media sosial dan data satelit yang terintegrasi dengan Kementerian KLH, serta penyusunan crisis communication plan tertulis. Kedua, pada fase respons: penerapan Golden Hour Protocol (pernyataan resmi dalam 60 menit pertama), kebijakan single spokesperson lintas kementerian, dan mekanisme verifikasi independen yang melibatkan auditor lingkungan eksternal. Ketiga, pada fase pasca-krisis: penerbitan Laporan Transparansi Tahunan tentang tata kelola pertambangan di kawasan sensitif dan pembentukan forum multipihak permanen sebagai mekanisme partisipatif pengawasan pertambangan.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa krisis reputasi Kementerian ESDM pada kasus tambang nikel di Raja Ampat merupakan preventable crisis yang sepenuhnya dapat dicegah apabila terdapat sistem manajemen risiko dan komunikasi proaktif yang memadai. Kendala sistemik dimulai dari fase pra-krisis: sinyal peringatan dari investigasi Greenpeace 2024 tidak ditindaklanjuti, dan tidak ada crisis preparedness plan yang operasional. Ini menegaskan bahwa investasi dalam kesiapsiagaan komunikasi pra-krisis memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada pengeluaran sumber daya untuk manajemen krisis reaktif.

Fragmentasi komunikasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian KLH menjadi defisit paling krusial dalam respons krisis. Kedua kementerian menyampaikan penilaian yang bertentangan secara publik, yang tidak hanya melemahkan kredibilitas pemerintah secara keseluruhan, tetapi juga mengkonfirmasi narasi LSM tentang lemahnya tata kelola lingkungan nasional. Temuan ini memperkuat pentingnya single spokesperson policy dan koordinasi pesan terpusat dalam manajemen krisis lembaga publik.

Dari perspektif model CERC, hampir seluruh fase implementasinya oleh ESDM menunjukkan gap signifikan. Enam prinsip CERC *be first, be right, be credible, express empathy, promote action, dan show respect* tidak diimplementasikan secara konsisten. Jaringan advokasi yang dipimpin Greenpeace berhasil mengontrol agenda media dan framing isu secara efektif melalui integrasi investigasi ilmiah, aksi simbolis yang terkalkulasi, dan kampanye digital terkoordinasi. Kasus ini membuktikan bahwa dalam ekosistem informasi digital, kemampuan komunikasi aktor non-negara dapat melampaui kapasitas institusi pemerintah yang tidak responsif dan tidak transparan.

Pada akhirnya, kasus Raja Ampat menegaskan bahwa manajemen krisis yang efektif bukan sekadar tentang menangani peristiwa ketika krisis meledak, melainkan tentang membangun sistem tata kelola, kepercayaan publik, dan komunikasi yang berkelanjutan jauh sebelum krisis terjadi. Bagi Kementerian ESDM dan lembaga publik serupa, ini merupakan pelajaran institutional yang memerlukan transformasi struktural, bukan sekadar perbaikan taktis komunikasi semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Coombs, W. T., 2014. *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding*, 4th ed., SAGE Publications.
- Fearn-Banks, K., 2016. *Crisis Communications: A Casebook Approach*, 5th ed., Routledge.
- O'Hair, H. D., Winn, T. P., Jr., & Friedman, P. G., 2008. *Handbook of Risk and Crisis Communication*, Routledge.
- Sandman, P. M., 1993. *Responding to Community Outrage: Strategies for Effective Risk Communication*, American Industrial Hygiene Association.
- Seeger, M. W., Sellnow, T. L., & Ulmer, R. R., 2003. *Communication and Organizational Crisis*, Praeger.
- Yin, R. K., 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed., SAGE Publications.
- Alfredo, R., Sinaga, E. H., & Sitorus, J. R., 2024. Kajian kriminologi hijau terhadap studi kasus hilirisasi tambang nikel, *Jurnal Lingkungan Kebumian Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/kebumian.v1i3.2572>
- CERAH, 2025. Mengobral Mineral Kritis: Mengungkap Persoalan Hilirisasi Nikel, Pusat Studi Ekonomi dan Reformasi Anggaran Hijau. <https://www.cerah.or.id/publications/article/detail/mengobral-mineral-kritis>
- Greenpeace Indonesia, 2025. Melindungi Surga Terakhir: Investigasi Greenpeace Ungkap Rencana Besar Industri Nikel di Raja Ampat, Siaran Pers, 12 Juni. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/63138/>
- Halimatussadiyah, A., et al., 2025. Dampak program hilirisasi nikel bagi masyarakat di daerah penghasil, dalam LPEM FEB UI Special Report: Raja Ampat, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, 2024. Keputusan Nomor 69.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Penetapan Mineral Strategis, Kementerian ESDM, Jakarta.
- LPEM FEB UI, 2025. Special Report: Raja Ampat — Analisis Dampak Pertambangan Nikel dan Rekomendasi Tata Kelola, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, Juli. <https://lpem.org/wp-content/uploads/2025/07/Special-Report-Raja-Ampat-1.pdf>
- Miller, A. N., Neuberger, L., & Sellnow, T. L., 2021. Being first, being right, and being credible since 2002: A systematic review of Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) research, *Journal of International Crisis and Risk Communication Research*, 4(1), hlm. 1–28. <https://doi.org/10.30658/jicrcr.4.1.1>
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J., 1997. Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts, *Academy of Management Review*, 22(4), hlm. 853–886. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9711022105>
- Reynolds, B., & Seeger, M. W., 2005. Crisis and emergency risk communication as an integrative model, *Journal of Health Communication*, 10(1), hlm. 43–55. <https://doi.org/10.1080/10810730590904571>
- Suhartini, R., Putra, A., & Dewi, M., 2024. Crisis management in Indonesian mining companies: Balancing social, economic, and environmental demands, *Journal of Cleaner Production*, 420, 138567. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.138567>

Veil, S., Reynolds, B., Sellnow, T. L., & Seeger, M. W., 2008. CERC as a theoretical framework for research and practice, *Health Promotion Practice*, 9(4 Suppl), hlm. 26S–34S. <https://doi.org/10.1177/1524839908322113>

WALHI, 2025. Pernyataan WALHI tentang Pencabutan Izin Tambang Raja Ampat, *Keterangan Tertulis*, 11 Juni. Dikutip dalam *Tempo.co*.